

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI PONDOK PESANTREN KREATIF BAITUL KILMAH BANTUL

Tafyiroh^{1*}, Erni Munastiwi²

UIN Sunan Kalijaga¹², Yogyakarta, Indonesia

[*21204091008@student.uin-suka.ac.id](mailto:21204091008@student.uin-suka.ac.id)

Abstract

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana serta sarana dan prasarana. Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjawab fokus penelitian mengenai pendidikan gratis di Pondok Pesantren. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pemimpin dan santri Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilamah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pengalokasian dana menggunakan sumber dana hasil dari penjualan karya buku para santri dan juga pengasuh pondok pesantren. Pengelolaan keuangan dilakukan terpusat pada lembaga dengan menggunakan pengumpulan kas lembaga. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilamah, Pajangan, Bantul, Yogyakarta.

Keyword: *Pengelolaan, Keuangan, Pendidikan Gratis*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹ Pendidikan sudah seharusnya menjadi wadah dalam penyiapan tenaga kerja, khususnya sebagai tindakan untuk mengarahkan siswa dengan tujuan untuk memberikan pengaturan dasar untuk dapat bekerja. Pembekalan mendasar yang penting dapat melalui penataan mentalitas, informasi, dan kemampuan kerja untuk generasi yang akan datang. Disamping itu, pendidikan juga dilihat sebagai sarana yang sangatlah esensial untuk mengangkat martabat dan harkat suatu negara serta dapat membentuk kepribadian maupun

¹ Mohamad Mustari et al., "Manajemen Pendidikan," (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 231.

kepribadian dari bangsa tersebut.² Pendidikan merupakan hak seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.³

Pendidikan dapat menjadi investasi untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram dengan baik dan menjangkau semua kalangan maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.⁴ Ada beberapa kriteria dan standar pendidikan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kependidikan, maka tidak akan pernah terlepas dari faktor pembiayaan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.⁵ Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada pasal yang lain disebutkan secara lebih jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/ atau keluarga peserta didik.⁶

Munculnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi dengan UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi babak baru bagi pendidikan SMK/SMA. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut pada akhirnya berdampak pada peralihan kewenangan pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan. Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengan Pertama (SMP) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (Pemkab/ Pemkot), sementara pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikelola oleh pemerintah provinsi.⁷

² Ayu Wulandari S Tanjung and Waizul Qarni, “Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan yang Dikelola Kementerian Agama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 481–90, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.57>.

³ Abner Demmarapa, dkk. *Sistem Pengelolaan dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berbasis Web*, (Pegguruang: Conference Series) 3, no. April (2021).

⁴ Wydha Mustika Maharani dan Sukardi, “Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015),” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.441>.

⁵ Djuwairiyah, Abd. Muqit dan Heni Listiana, “Manajemen Pembiayaan dalam Mutu Pendidikan,” *Journal Multicultural of Islamic Education* 4, no. 2 (2021): 81–92.

⁶ J Iskandar, “Implementasi Sistem Manajemen Keuangan,” *Idaarah* 3, no. 1 (2019): 114–23, <https://core.ac.uk/download/pdf/234752746.pdf>.

⁷ Daris Wibisono, Setiawan Indah dan Mei Astuti, “Model Inovasi Tata Kelola Sekolah Gratis (Studi Di Sekolah Menengah Kejuruan Nabdlatul Ulama Tenggara Kabupaten Bondowoso)” 3, no. 1 (2022): 70–84.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan berjalannya proses kegiatan belajar, dibutuhkan pengelolaan pembiayaan yang profesional baik dalam penggalan sumber dana maupun penyaluran dan penggunaan dana.⁸ Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, perencanaan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya yang ada agar proses pembelajaran dapat berjalan.⁹ Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.¹⁰ Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar di sekolah. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil kualitas proses pendidikan¹¹ Meskipun pembiayaan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan berkualitas hanya dalam angan-angan.¹²

Pembiayaan pendidikan sangat membantu proses penyelenggaraan pendidikan supaya dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuannya dapat tercapai. Pembiayaan dipergunakan guna memenuhi investasi lembaga seperti pengadaan sarana dan prasarana, operasional lembaga dan kebutuhan lain yang dapat menunjang tercapainya visi dan misi lembaga sehingga lembaga dapat memiliki mutu yang baik dan akan tercipta kepuasan baik bagi pemimpin, wali murid hingga masyarakat.¹³ Terutama dalam aspek finansial, pihak sekolah bersama masyarakat diberikan kewenangan untuk menyusun pembiayaan serta diwajibkan untuk mengawasi dan mengontrol penggunaannya guna untuk kepentingan pendidikan. Pada era otonomi saat sekarang ini warga sekolah (guru dan kepala sekolah beserta staf karyawan sekolah) diberikan tanggung jawab yang besar dalam mengelola pendidikan.¹⁴ Pendidikan harus terus tetap berlangsung dan pendidikan juga membutuhkan biaya dalam operasionalnya.¹⁵ Karena mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung efektifitas dan

⁸ Tria Zuliatul Faiza, *Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Pendidikan MI Raudlatul Muta'allimin I, Umsida 3* (2015): 103–11.

⁹ Surya Andikusumo, "Manajemen Keuangan Sekolah," *Manajer Pendidikan* 10, no. 4 (2016): 343–46, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>.

¹⁰ Fitria Hindahsari dkk, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, *Jurnal Kependidikan Islam* 12, No. 1 (2022): 32–41, <https://doi.org/10.15642/jkpi.2022.12.1.32-41>.

¹¹ Luthfia Yuli Kurniawan, "Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan," 2019, 5.

¹² Wahidin, "Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan Di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur," (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 2.

¹³ Maulidatul Rahma, "Pengaruh Pengelolaan Dana Bopda Terhadap Mutu dan Kepuasan Kepala Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik" 12 (2022): 182–96, <https://doi.org/10.15642/jkpi.2022.12.2.182>.

¹⁴ Sigit Wahyudi, "Peranan Dana Bantuan Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di MT Teros Tahun Anggaran 2019/2020." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7 Nomor 1, Juni 2021.

¹⁵ Yudha Aditya, Adam Idris dan Anwar AS, "Peran Dinas Pendidikan dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019), [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51).pdf).

efisiensi dalam pengelolaan pendidikan.¹⁶ Pengelolaan keuangan juga merupakan hal wajib yang perlu dilakukan oleh lembaga.¹⁷ Pengelolaan keuangan pada setiap lembaga pendidikan berbeda dengan pengelolaan keuangan perusahaan yang memiliki pandangan profit atau laba, memberikan keuntungan atau memberikan kerugian.¹⁸

Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik atau orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis dimaksudkan untuk meningkatkan taraf pendidikan bagi masyarakat.¹⁹ Pendidikan gratis berarti pendidikan tanpa biaya, atau pendidikan yang menghilangkan semua biaya yang menjadi beban masyarakat menjadi ditanggung oleh pemerintah, sehingga pendidikan gratis dimaknai sebagai program pemerintah untuk membebaskan biaya sekolah. Sedangkan dari segi istilah Pendidikan gratis adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan peserta didik, orang tua peserta didik maupun masyarakat dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah.²⁰ Tujuan program ini selain untuk memenuhi amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah dan juga meningkatkan angka partisipasi pendidikan.²¹ Pembebasan biaya pendidikan merupakan hal yang penting pada negara-negara berkembang. Misalnya di Vietnam, pembebasan biaya pendidikan merupakan instrumen untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan bagi siswa miskin.²²

Program pendidikan gratis menjadi tanggung jawab sekolah dalam mengelola sumber dana yang didapat dari pemerintah. Hal ini menjadi alasan pentingnya dalam pengelolaan keuangan dalam program pendidikan gratis. Setiap sekolah atau lembaga memiliki karakteristik sendiri dalam pengelolaan keuangan, terutama pada lembaga yang menerapkan pendidikan gratis,²³ tidak terkecuali pesantren. Kebijakan pendidikan gratis di pondok pesantren dilatar belakangi oleh penyebaran pendidikan berbasis islam yang kurang merata sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan terutama kalangan kurang mampu. Ketidakmampuan orang tua

¹⁶ Lilik Huriyah, "Penggunaan Analisis Presentase dan Rasio Likuiditas dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 1 (2012): 103–23.

¹⁷ Rizka Hadiwiyanti, "Perancangan Sistem Keuangan Sekolah dengan Prototyping (Studi Kasus : Madrasah Aliyah Nu Sidoarjo)," *Konstelasi: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi* 1, no. 2 (2021): 382–90, <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i2.4298>.

¹⁸ M. Masruri, Hapzi Ali dan Kemas Imron Rosadi, "Pengelolaan Keuangan Dalam Mempertahankan Kualitas Pondok Pesantren Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 644–57, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.573>.

¹⁹ Siti Asyiah dkk, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman," *Jurnal of Public Sector Innovation*, Vol. 2, No. 1, November Tahun 2017 (1–9), www.klikpositif.com.

²⁰ Ibnu Rawandhy, N Hula dan Ana Mariana, "Aksesibilitas Pendidikan Gratis Pada Sekolah Swasta Di Gorontalo Utara," *Irfani* 16, no. 2 (2020): 1–27, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>.

²¹ Silfy Maidianti, "Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Pada Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang," *Jurnal Solusi* 16, no. 3 (2018): 321–43, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.140>.

²² M. Irsyad Fadoli, Teguh Yuwono dan Tri Yuningsih, "Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 5, no. 1 (2021): 88, <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3216>.

²³ Diyan Lestari, "Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan," *Abdimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 23–29, <https://doi.org/10.53008/abdimas.v1i1.24>.

untuk memberikan sokongan dana kepada anak-anak mereka yang mencari ilmu di pondok pesantren juga menjadi dorongan dalam menerapkan kebijakan pendidikan gratis ini.

Kegiatan pengelolaan keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip, antara lain, 1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku, 2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan lembaga pendidikan, 3) keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan, 4) transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik, 5) penguatan partisipasi publik atau masyarakat.²⁴ Di pesantren, pengelolaan keuangan sebenarnya tidak begitu rumit, sebab pesantren merupakan lembaga swadana yang tidak memerlukan pertanggungjawaban keuangan yang terlalu pelik kepada penyandang dananya.²⁵ Untuk sekolah berbasis Swasta atau pondok pesantren, pengaturan tentang pembiayaan pendidikan sifatnya tergantung dari lembaga pendidikan tersebut.²⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai sumber instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara triangulasi (gabungan).²⁷ Penelitian ini dilakukan di salah satu pondok pesantren yang menerapkan program pendidikan gratis, yaitu Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen utama dalam pengambilan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat kondisi lapangan secara langsung. Sedangkan wawancara dilakukan dengan santri dan pimpinan Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kimah yang memahami betul terkait kondisi dan lingkungan di Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, Bantul.

Untuk pengumpulan data, terdapat dua jenis data yang mendukung dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder²⁸. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel maupun media lainnya yang dapat mendukung terkait tema penelitian.

²⁴ Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Wami Tune Sumar, "Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan," *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 110, 2017.

²⁵ Ummu Salamah, "Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan," (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 134.

²⁶ Fransisca Wulandari, dkk. "Analisis Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Srandakan", *Alsyls: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, 01 Januari 2022: 75–83.

²⁷ Ahmad Ali Azim, "Tradisi Literasi Pesantren: Manajemen Pendidikan Literasi Di Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Yogyakarta," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hal. 108.

²⁸ Rukminingsih, Gunawan Adnan dan Mohammad Adnan Latief, "Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2020.

Untuk melakukan analisis data, penelitian ini mengikuti kerangka berpikir Miles dan Huberman. Dalam pandangan Miles dan Huberman dalam Sjafiatul Mardiyah dkk, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data redution*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Analisa data dilakukan selama pengumpulan data dengan tahapan membuat ringkasan kontak, kode dan pengkodean, pola dan mengembangkan proposisi.²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok pesantren kreatif Baitul Kilmah ini berlokasi di Dukuh Kayen RT 04 Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Pondok Pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Aguk Irawan merupakan pondok kelanjutan dari Sanggar Terjemahan Arab pada tahun 2007, yang awalnya berada di Perumahan Kasongan Permai Jalan rembulan Blok C No. 106 Sewon, Bantul. Semenjak berdirinya Pondok Baitul Kilmah sudah konsisten untuk melestarikan adat budaya literasi yang semakin berkurang dalam kehidupan orang, khususnya dalam pendidikan. Pengasuh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah yang merupakan sastrawan pesantren nusantara bertekad menyalurkan dunia literasi kepada santri-santrinya demi melestarikan literasi di zaman yang serba maju dan instan. Beberapa faktor yang menjadikan pondok pesantren ini berbeda dengan pondok pesantren yang lainnya salah satunya adalah setiap santri diberi kebebasan memilih sesuai bakat dan minat mereka, bisa menulis cerpen, puisi, novel, menerjemahkan kitab atau menerjemahkan manuskrip berkasara kawi.

Semua santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah memiliki latar belakang keluarga kurang mampu. Selain mereka mempunyai semangat tinggi untuk belajar, mayoritas dari mereka sudah pernah nyantri di pondok pesantren lain, namun terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terbentur masalah biaya. Berawal dari keresahan tersebut, maka pengasuh Pondok Pesantren menerapkan pendidikan gratis dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan karya santri-santrinya. Pendidikan gratis sebagai pendidikan yang diberikan kepada para snatri tanpa pungutan biaya. Akan tetapi, santri mungkin tetap mempunyai pengeluaran untuk mendapatkan pendidikan gratis, seperti buku dan bahan ajar lain ataupun kebutuhan hidup sehari-hari. Pendidikan gratis dapat pula diberikan kepada santri dalam bentuk beasiswa atau hibah yang menutup semua atau hampir semua pengeluaran santri untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.³⁰

Oleh karena itu, pengasuh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah mengajak sebagian santri untuk menerjemah kitab, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil menerjemah. Terhitung sejak tahun 2007, Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah berhasil membuat Ensiklopedi Ulama Nusantara 9 Jilid, Tafsir Jilani 12 Jilid, Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 1-3, Ensiklopedi Sains Islami 9 Jilid, Kamus Bahasa Indoensia-Ibrani,

²⁹ Sjafiatul Mardiyah, Hotman Siahaan dan Tuti Budirahayu, “Pengembangan Literasi Dini Melalui Kerjasama Keluarga dan Sekolah di Taman Anak Sanggar Anak Alam Yogyakarta”, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 4, No. 2 (2020): 892–99, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.476>.

³⁰ Abbas Ghozali, “Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Kebutuhan Dana Untuk Pendidikan Dasar Gratis,” Jurnal Cakrawala Pendidikan, No. 1 Februari Tahun 2012: 1–22, <https://doi.org/10.21831/cp.v0i1.1463>.

Kamus Bahasa Indonesia-Rusia yang terjual laris di Indonesia, serta ratusan buku populer dan juga terjemahan lainnya.

Setiap lembaga mempunyai rencana anggaran sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Penganggaran dana pada Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah berpatokan pada semua sumber dana yang diperoleh dari hasil penjualan buku. Semua dana yang diperoleh akan digunakan oleh lembaga sendiri. Perencanaan keuangan berhubungan dengan proses penganggaran dan juga pengalokasian dana pendidikan yang mengacu pada pendapatan sumber dana. Pada lembaga pendidikan pesantren ini mendapatkan dana hasil penjualan karya tulis dari santri ataupun pengasuh pondok pesantren yang berupa buku tersebut, dan hasil dari penjualan produk kaos sablon. Ataupun dari sumbangan donatur yang tidak tetap. Donatur tidak tetap ini tidak hanya uang saja, tetapi bisa dalam bentuk sumbangan barang yang dapat mendukung kebutuhan personal dan operasional ataupun pembangunan lembaga. Berkat penjualan karya-karya santri, pondok pesantren yang bernaung pada Yayasan Pesantren Kreatif Baitul Kilmah sudah mendirikan SMK Pearadaban Dunia yang letaknya tidak jauh dari Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah.

Sumber dana dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah diperlukan guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pendidikan, bahwa pembiayaan pendidikan sesuai dengan analisis terhadap sumber-sumber dana yang didapatkan dan penggunaan dana (*expenditure*) yang diperuntukkan untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Sumber-sumber keuangan yang telah didapatkan oleh setiap lembaga dijadikan satu dengan sistem terpusat pada yayasan dengan tujuan untuk memudahkan Yayasan dalam melakukan proses penganggaran dan pengalokasian dana pada setiap lembaga. Seluruh sumber dana, baik dari donatur ataupun hasil penjualan buku dijadikan satu di yayasan untuk memenuhi kebutuhan personal maupun operasional, dan pembangunan pondok sebagai upaya untuk memfasilitasi santri dalam pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki dari setiap santri. Proses sumber dana dimulai dengan setiap santri wajib memiliki satu karya, karena latar belakang dari berdirinya Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah ini adalah berbasis literasi. Kemudian setelah santri mempunyai karya maka buku tersebut dijual. Keuangan di semua lembaga digunakan untuk seluruh kebutuhan yang mencakup biaya personal maupun operasional. Penggunaan keuangan pada lembaga pendidikan menjadi bahan perbandingan dengan perencanaan yang telah dirumuskan, tanpa terkecuali lembaga yang menerapkan pendidikan gratis atau tanpa ada pungutan biaya.

Kadang kala ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dirancang, jadi lembaga meminimalisir nominal untuk pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah menerapkan pendidikan gratis, dan untuk memenuhi kebutuhan lembaga dengan cara penerbitan karya pribadi maupun kelompok dengan beberapa santri. Penggunaan keuangan juga berdasarkan persetujuan dari pengasuh pondok pesantren. Pondok pesantren mensubsidi dana yang masuk kemudian dimasukkan dalam kas pondok, dengan tujuan sewaktu-waktu ketika ada kegiatan atau kebutuhan mendesak bisa digunakan. Penggunaan keuangan dari hasil karya santri ini tidak menjadi kontra baik antar sesama santri ataupun wali santri. Karena semua mengerti bahwa dana yang digunakan bukan untuk penyalahgunaan tetapi lebih pada pengalihan dana karena sistemnya dari lembaga kembali ke lembaga. Kebijakan ini sudah disetujui dan ditetapkan sejak berdirinya pondok pesantren bahwa pengelolaan dana pondok pesantren dihasilkan dari karya santri. Dengan adanya kebijakan ini,

maka setiap santri diwajibkan memiliki karya yang nantinya selain untuk membantu pemasukan dana juga sebagai pengembangan potensi santri selama di pondok pesantren. Penggunaan dana personal ataupun operasional murni dari hasil penjualan karya santri dan juga pengasuh pondok pesantren. Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah juga tidak menerapkan pembayaran registrasi pondok dan pembayaran bulanan.

Penggunaan keuangan yang digunakan oleh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah untuk lembaga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan pondok pesantren, yaitu penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, baik dari pemerintah ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut: (1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan, (3) terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan disertai penggunaannya, (4) sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.³¹

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah ini mendapatkan dana dari penjualan karya tulis santri ataupun pengasuh pondok pesantren yang berupa buku tersebut, dan juga hasil dari penjualan kaos sablon. Sumber-sumber keuangan yang telah didapatkan oleh setiap lembaga dijadikan satu dengan sistem terpusat pada lembaga dengan tujuan untuk memudahkan lembaga dalam melakukan proses penganggaran dan pengalokasian dana pada setiap lembaga. Seluruh sumber dana, baik dari donatur ataupun hasil penjualan buku dijadikan satu di lembaga untuk memenuhi kebutuhan personal maupun operasional, dan pembangunan pondok sebagai upaya untuk memfasilitasi santri dalam pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki dari setiap santri-santri. Kebijakan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah menerapkan pendidikan gratis, dan untuk memenuhi kebutuhan lembaga dengan cara penerbitan karya pribadi maupun kelompok dengan beberapa santri. Penggunaan keuangan yang digunakan oleh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah untuk lembaga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan pondok pesantren yaitu penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, dari pemerintah ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Yudha, Adam Idris dan Anwar AS. “Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda.” E-Journal Ilmu Pemerintahan 7, no. 1 (2019): 507–18. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjal (03-30-19-10-50-51).pdf.
- Ahmad Ali Azim. 2019. “Tradisi Literasi Pesantren: Manajemen Pendidikan Literasi Di Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Yogyakarta,” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).
- Andikusumo, Surya. 2016. “Manajemen Keuangan Sekolah.” Manajer Pendidikan 10, no. 4 (2016): 343–46.

³¹ M Abid Dzulfikar, *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang: 2015), hal. 2.

<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>.

Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Wami Tune Sumar. 2017. "*Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*". Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 110, 2017.

Asyiah, Siti dan M Fachri Adnan. 2013. "*Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman*," Jurnal of Public Sector Innovation, 1–9. www.klikpositif.com.

Demmarrapa, Abner. Ul Khairat dan Ashabul Kahpi. 2021. "*Sistem Pengelolaan dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berbasis Web*." Journal Peguruang: Conference Series, 3.

Rakhma, Maulidatul. 2022. "*Pengaruh Pengelolaan Dana Bopda Terhadap Mutu dan Kepuasan Kepala Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik*." Jurnal Kependidikan Islam. <https://doi.org/0.15642/jkpi.2022.12.2.182>.

Wulandari, Fransisca, dkk. 2022. "*Analisis Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Grtais di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Srandakan*." Alslys: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol 2, No. 1.

Djuwairiyah, Abd. Muqit dan Heni Listiana. 2021. "*Manajemen Pembiayaan dalam Mutu Pendidikan*." Journal Multicultural Of Islamic Education 4, no. 2.

Dzulfikar, M Abid. 2015. *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal*." (Semarang: Universitas Negeri Semarang).

Fadoli, M. Irsyad, Teguh Yuwono dan Tri Yuningsih. 2021. "*Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang*." Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial 5, no. 1. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3216>.

Faiza, Tria Zuliatul. 2015. "*Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Pendidikan MI Raudlatul Muta'allimin I*." Umsida 3.

Ghozali, Abbas. 2012. "*Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Kebutuhan Dana Untuk Pendidikan Dasar Gratis*." Jurnal Cakrawala Pendidikan, no. 1. <https://doi.org/10.21831/cp.v0i1.1463>.

Hadiwiyanti, Rizka. 2021. "*Perancangan Sistem Keuangan Sekolah dengan Prototyping (Studi Kasus : Madrasah Aliyah Nu Sidoarjo)*." Konstelasi: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi 1, no. 2. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i2.4298>.

Hindahsari, Fitria, Lilik Huriyah dan Nur Fitriatin. 2022. "*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*." Jurnal Kependidikan Islam 12, no. 1. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2022.12.1.32-41>.

Huriyah, Lilik. 2012. "*Penggunaan Analisis Presentase dan Rasio Likuiditas Dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Di Lembaga Pendidikan*." Jurnal Kependidikan Islam 2, no. 1.

Iskandar, J. 2019. "*Implementasi Sistem Manajemen Keuangan*." Idaarah 3, no. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/234752746.pdf>.

Kurniawan, Luthfia Yuli. 2019. "*Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan*." 5.

- Lestari, Diyan. 2020. "Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Abdimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1. <https://doi.org/10.53008/abdimas.v1i1.24>.
- Maharani, Wydha Mustika dan Sukardi. 2016. "Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 2. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.441>.
- Maidianti, Silfy. 2018. "Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara pada Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang." *Solusi* 16, no. 3. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.140>.
- Mardiyah, Sjafiatul, Hotman Siahaan dan Tuti Budirahayu. 2020. "Pengembangan Literasi Dini Melalui Kerjasama Keluarga dan Sekolah di Taman Anak Sanggar Anak Alam Yogyakarta." *Jurnal Obsesi Pendidikan Anak Usia Dini*. 4, no. 2. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.476>.
- Masruri, M., Hapzi Ali dan Kemas Imron Rosadi. 2021. "Pengelolaan Keuangan dalam Mempertahankan Kualitas Pondok Pesantren Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.573>.
- Mustari, Mohamad dan M Taufiq Rahman. 2014. "Manajemen Pendidikan." (Jakarta: Raja Grafindra Persada).
- Rawandhy, Ibnu, N Hula dan Ana Mariana. 2020. "Aksesibilitas Pendidikan Gratis pada Sekolah Swasta di Gorontalo Utara." *Irfani* 16, no. 2. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>.
- Rukminingsih, Gunawan Adnan dan Mohammad Adnan Latief. 2020. "Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas." *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53.
- Salamah, Ummu. 2013. "Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan." (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Wahidin. 2016. "Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan Di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur." (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Wahyudi, Sigit. 2021. "Peranan Dana Bantuan Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di MTs Teros Tahun Anggaran 2019/2020." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*.
- Wibisono, Daris, Setiawan Indah dan Mei Astuti. 2022. "Model Inovasi Tata Kelola Sekolah Gratis (Studi di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Tenggara Kabupaten Bondowoso)." *Mitra Pendidikan: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3, no. 1.
- Wulandari S Tanjung, Ayu dan Waizul Qarni. 2022. "Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan Yang Dikelola Kementerian Agama Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, no. 5. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.57>.